



**LAPORAN SURVEI**  
**INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI**  
**DI PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN**  
**JANUARI - MARET 2025**



**TAHUN**  
**2025**



**LEMBAR PENGESAHAN**

**LAPORAN**

**INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN  
JANUARI – MARET 2025**

Disahkan di Sarolangun

10 April 2025



Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun

**NOVARINA MANURUNG, S.H**  
**NIP. 19761109 200112 2 002**

*Assalamuallaikum Wr.Wb.*

Dalam rangka Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum serta untuk mendukung Reformasi Birokrasi serta menuju Zona Integritas di Lingkungan Badan Peradilan Umum, Pengadilan Negeri Sarolangun telah mengadakan Survey Indeks Persepsi Korupsi yang berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum tertanggal 13 April 2016 Nomor 520/DJU/PS.02/4/2016 serta mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar. Pengadilan menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat sehubungan dengan kualitas pelayanan di lingkungannya. Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitik beratkan pada integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas penyelenggara pelayanan publik akan dinilai dari potensi terjadinya tindakan suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan oleh negara.

Pelaksanaan dan laporan survei sangat terbuka atas masukan, kritik dan saran agar ke depan pelaksanaan dari laporan survei dapat lebih baik sehingga berguna bagi berbagai pihak khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Negeri Sarolangun dan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Negeri Sarolangun.

Sarolangun, 10 April 2025

Tim Survei

	<i>Halaman</i>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	v
<b>BAB. I    PEDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan .....	1
1.3. Landasan Hukum.....	2
1.4. Rencana Kerja .....	2
<b>BAB. II    METODOLOGI</b>	
2.1. Metode Penelitian.....	4
2.2. Populasi dan Sampel .....	4
2.3. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis .....	4
2.4. Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control .....	4
2.5. Teknik Analisis Data .....	5
2.6. Tahapan Pelaksanaan .....	5
<b>BAB. III    Indeks Persepsi Anti Korupsi</b>	
3.1. Profil Responden .....	7
3.2. Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator .....	9
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja .....	15
3.4. Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan .....	16
<b>BAB. IV    Penutup</b>	
4.1. Kesimpulan .....	18
4.2. Rekomendasi .....	18
<b>LAMPIRAN</b>	

<i>No. Tabel</i>		<i>Halaman</i>
1.	Model Alur Penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas .....	5
2.	Ruang Lingkup survei Indeks Persepsi Korupsi .....	6
3.	Nilai Persepsi .....	6
4.	Tingkat Pendidikan Responden .....	7
5.	Jenis Pekerjaan Responden .....	7
6.	Kelompok Usia Responden .....	8
7.	Kelompok Jenis Kelamin .....	9
8.	Indeks Pada Indikator Manipulasi Peraturan .....	9
9.	Indeks Pada Indikator Penyalahgunaan Jabatan .....	10
10.	Indeks Pada Indikator Menjual Pengaruh .....	10
11.	Indeks Pada Indikator Transaksi Biaya .....	11
12.	Indeks Pada Indikator Biaya Tambahan .....	12
13.	Indeks Pada Indikator Hadiah .....	12
14.	Indeks Pada Indikator Transparansi Biaya .....	13
15.	Indeks Pada Indikator Pencaloan .....	14
16.	Indeks Pada Indikator Perbuatan Curang .....	14
17.	Indeks Pada Transaksi Rahasia .....	15
18.	Indeks Persepsi Korupsi Satua Kerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun .....	16
19.	Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun .....	16
20.	Isian masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja Pada Pengadilan Negeri Sarolangun .....	16

## Daftar Gambar

<i>No. Gambar</i>		<i>Halaman</i>
1.	Grafik Tingkat Pendidikan Responden .....	7
2.	Grafik Jenis Pekerjaan Responden .....	8
3.	Grafik Kelompok Usia Reponden .....	8
4.	Grafik Kelompok Jenis Kelamin .....	9
5.	Graik Indeks Pada Indikator Manipulasi Peraturan .....	9
6.	Grafik Indeks Pada Indikator Penyalahgunaan Jabatan .....	10
7.	Grafik Indeks Pada Indikator Menjual Pengaruh .....	11
8.	Grafik Indeks Pada Indikator Transaksi Biaya .....	11
9.	Grafik Indeks Pada Indikator Biaya Tambahan .....	12
10.	Grafik Indeks Pada Indikator Hadian .....	13
11.	Grafik Indeks Pada Indikator Transparansi Biaya .....	13
12.	Grafik Indeks Pada Indikator Percaloan .....	14
13.	Grafik Indeks Pada Indikator Perbuatan Curang .....	15
14.	Grafik Indeks Pada Indikator Transaksi Rahasia .....	16

## 1.1. Latar Belakang

Sehubungan dengan implementasi Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), satuan kerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun berkomitmen untuk tetap melaksanakan perbaikan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

Tindak lanjut tersebut didasarkan pada amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2017 serta bertitik tumpu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat sehubungan dengan peningkatan kualitas pelayanan dilingkungannya.

Terwujudnya Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani menitikberatkan pada integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

## 1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pengadilan Negeri Sarolangun.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.

### **1.3. Landasan Hukum**

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

### **1.4. Rencana Kerja**

#### **1.4.1. Persiapan**

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana  
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
  - a. Link dan Barcode Aplikasi SI SUPER (Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik)
  - b. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
  - a. Jumlah Responden.
  - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal  
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

#### **1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data**

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya

dikumpulkan ditempat yang telah disediakan.

- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

#### **1.4.3. Metode Survei**

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (empat kali dalam satu tahun).

### 2.1. Metode Penelitian

Penelitian Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

### 2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

### 2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Sarolangun.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

### 2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu tiga bulan sekali atau empat kali dalam setahun. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun). Wakil Ketua Pengadilan Sarolangun akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara

tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPAK.

## 2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks persepsi anti korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan Indeks Persepsi Korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

**Pertama**, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

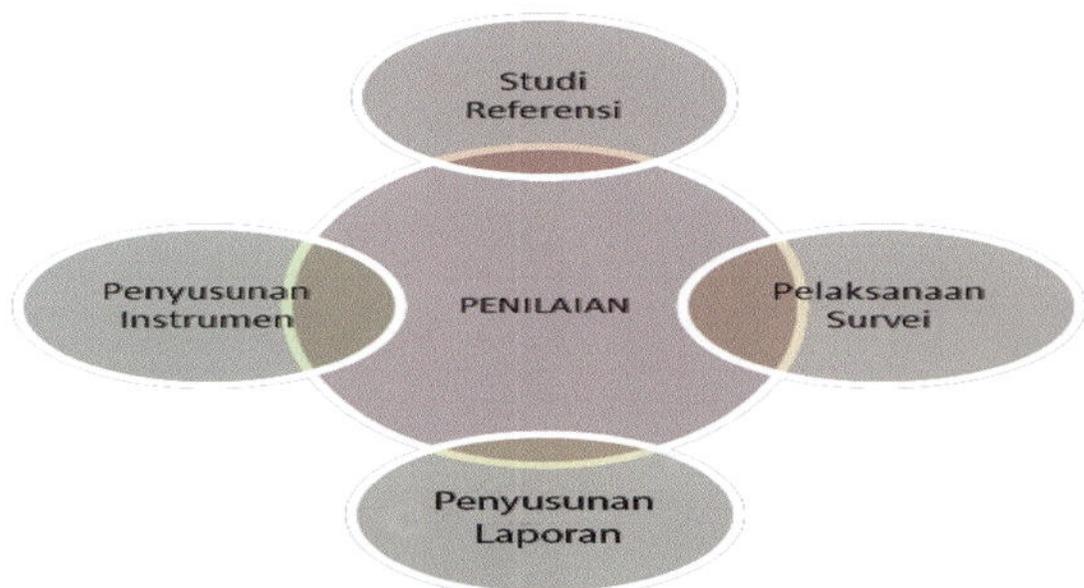
Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

## 2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

**Tabel 1**  
**Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas**



**Tabel 2**  
**Ruang lingkup survei Indeks Persepsi Korupsi**

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transaksi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Pembayaran
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

**Tabel 3**  
**Nilai Persepsi**

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25,00 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

## BAB III. INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

### 3.1 PROFIL RESPONDEN

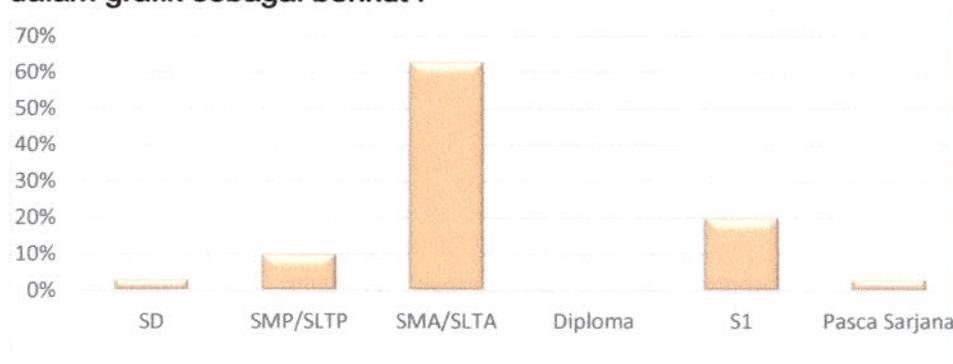
#### 3.1.1. Tingkat Pendidikan Responden.

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di pada Pengadilan Negeri Sarolangun mayoritas memiliki latar belakang pendidikan SMA/SLTA dengan persentase 63,00 % (Enam Puluh Tiga persen)

**Tabel 4. Tingkat Pendidikan Responden**

No	Pendidikan	Frekuensi	%
1.	SD	1	3
2.	SMP/ SLTP	3	10
3.	SMA/ SLTA	19	63
4.	Diploma	0	0
5.	Sarjana	6	20
6.	Pasca Sarjana	1	3
<b>Jumlah</b>		<b>30</b>	<b>100</b>

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut :



**Gambar 1.**  
**Grafik Tingkat Pendidikan Responden**

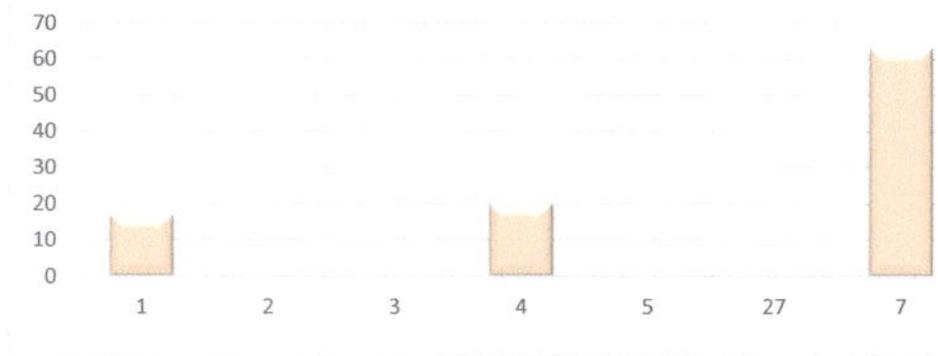
#### 3.1.2. Pekerjaan Responden.

Dari ruang lingkup jenis pekerjaan responden, pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Sarolangun mayoritas memiliki pekerjaan Lainnya sebesar 63,00 % (Enam Puluh Tiga persen).

**Tabel 5. Jenis Pekerjaan Responden**

No	Pekerjaan	Frekuensi	%
1.	Pegawai Negeri Sipil	5	17
2.	TNI	0	0
3.	Polri	0	0
4.	Swasta	6	20
5.	Wirausaha	0	0
6.	Tenaga Kontrak	0	0
7.	Lainya	19	63
<b>Jumlah</b>		<b>30</b>	<b>100</b>

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut :



**Gambar 2.**  
**Grafik Jenis Pekerjaan Responden**

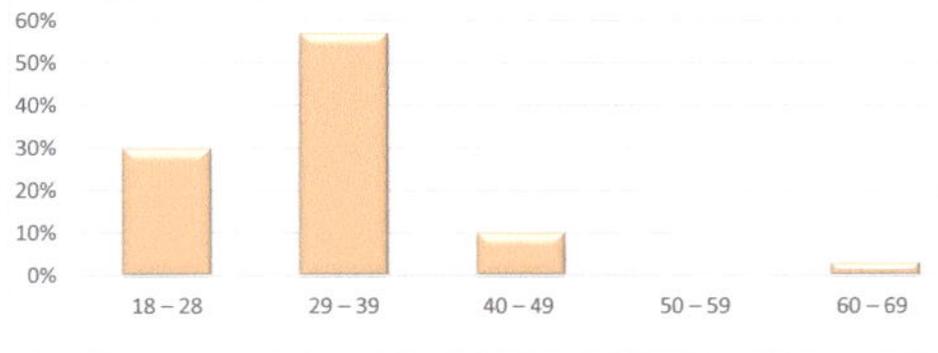
### 3.1.3. Kelompok Usia Responden.

Dari data yang terkumpul selama survei, diperoleh data bahwa berdasar Kelompok Usia Responden pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Sarolangun mayoritas berumur antara 29 sampai dengan 39 tahun dengan persentase sebesar 57,00 % (Lima puluh Tujuh persen).

**Tabel 6. Kelompok Usia Responden**

No	Umur	Frekuensi	%
1.	18 – 28	9	30
2.	29 – 39	17	57
3.	40 – 49	3	10
4.	50 – 59	0	0
5.	60 – 69	1	3
<b>Jumlah</b>		<b>30</b>	<b>100</b>

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut :



**Gambar 3.**  
**Grafik Kelompok Usia Responder**

### 3.1.4. Kelompok Jenis Kelamin.

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Sarolangun berdasarkan kelompok jenis kelamin, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan Pada Pengadilan Negeri Sarolangun adalah laki-laki dengan persentase 53,00 %. (Lima puluh Tiga persen)

**Tabel 7. Kelompok Jenis Kelamin**

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	%
1.	Laki-laki	16	53
2.	Perempuan	14	47
<b>Jumlah</b>		<b>30</b>	<b>100</b>

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut :



**Gambar 4.**

### 3.2. INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI PERINDIKATOR

#### 3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Ruang Lingkup Manipulasi Peraturan ini diperoleh rata-rata skor 3,93 (Tiga koma Sembilan Tiga) berada pada interval 3,26 s/d 4,00, dengan kategori kinerja “bersih dari korupsi”. Dengan demikian kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun dalam Ruang Lingkup Manipulasi Peraturan dalam katagori berkinerja “bersih dari korupsi”.

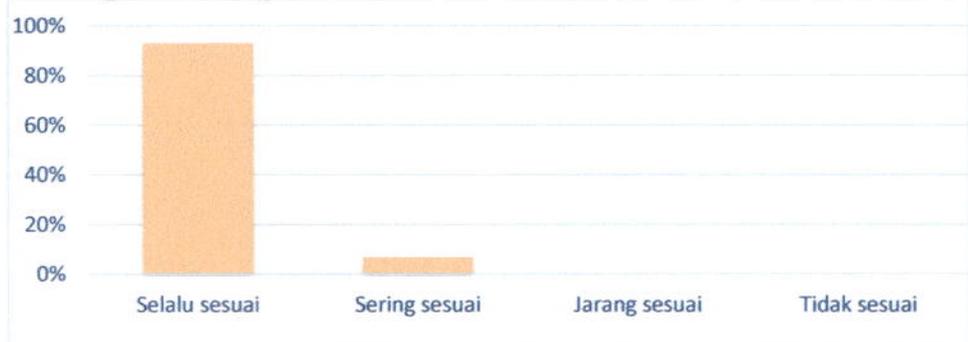
Hasil jawaban kuesioner Indeks Persepsi Anti Korupsi pengguna layanan di Pengadilan Negeri Sarolangun, Ruang lingkup Manipulasi Peraturan di sajikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 8. Indeks Pada Indikator Manipulasi Peraturan**

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	%	NRR
1.	Tidak sesuai	1	0	0	0,00
2.	Jarang sesuai	2	0	0	0,00
3.	Sering sesuai	3	2	7	0,200
4.	Selalu sesuai	4	28	93	3,733
<b>Jumlah</b>			<b>30</b>	<b>100</b>	<b>3,933</b>

\*NRR : Nilai Rata-Rata diperoleh dari jumlah nilai perunsur dibagi dengan jumlah responden.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut :



**Gambar 5.**

### Grafik Indeks Pada Indikator Manipulasi Peraturan

#### 3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Ruang Lingkup Penyalahgunaan Jabatan ini diperoleh rata-rata skor 4,00 (Empat koma Nol) berada pada interval 3,26 s/d 4,00, dengan kategori kinerja “bersih dari korupsi”. Dengan demikian kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun dalam Ruang Lingkup Penyalahgunaan Jabatan dalam katagori berkinerja “bersih dari korupsi”.

Hasil jawaban kuesioner Indeks Persepsi Anti Korupsi pengguna layanan di Pengadilan Negeri Sarolangun, Ruang lingkup Penyalahgunaan Jabatan di sajikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 9.Indeks Pada Indikator Penyalahgunaan Jabatan**

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	%	NRR
1.	Selalu meminta	1	0	0	0,00
2.	Sering meminta	2	0	0	0,00
3.	Jarang meminta	3	0	0	0,00
4.	Tidak ada meminta	4	30	100	4,00
<b>Jumlah</b>			<b>30</b>	<b>100</b>	<b>4,00</b>

\*NRR : Nilai Rata-Rata diperoleh dari jumlah nilai perunsur dibagi dengan jumlah responden.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut :



**Gambar 6.**  
**Grafik Indeks Pada Indikator Penyalahgunaan Jabatan**

#### 3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Ruang Lingkup Menjual Pengaruh ini diperoleh rata-rata skor 4,00 (Empat koma Nol) berada pada interval 3,26 s/d 4,00, dengan kategori kinerja “bersih dari korupsi”. Dengan demikian kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun dalam Ruang Lingkup Penyalahgunaan Jabatan dalam katagori berkinerja “bersih dari korupsi”.

Hasil jawaban kuesioner Indeks Persepsi Anti Korupsi pengguna layanan di Pengadilan Negeri Sarolangun, Ruang lingkup Menjual

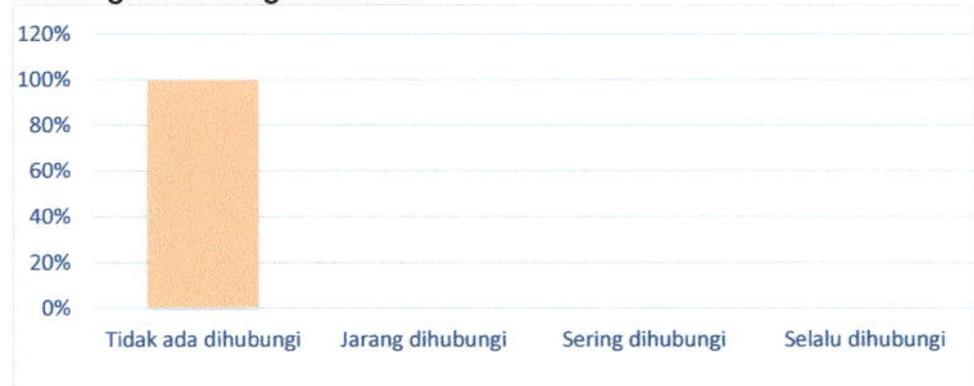
Pengaruh di sajikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 10. Indeks Pada Indikator Menjual Pengaruh**

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	%	NRR
1.	Selalu dihubungi	1	0	0	0,00
2.	Sering dihubungi	2	0	0	0,00
3.	Jarang dihubungi	3	0	0	0,00
4.	Tidak ada dihubungi	4	30	100	4,00
<b>Jumlah</b>			<b>30</b>	<b>100</b>	<b>4,00</b>

\*NRR : Nilai Rata-Rata diperoleh dari jumlah nilai perunsur dibagi dengan jumlah responden.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut :



**Gambar 7.**

**Grafik Indeks Pada Indikator Menjual Pengaruh**

#### 3.2.4. Indikator Transaksi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Ruang Lingkup Transaksi Biaya ini diperoleh rata-rata skor 3,967 (Tiga koma Sembilan Enam Tujuh) berada pada interval 3,26 s/d 4,00, dengan kategori kinerja “bersih dari korupsi”. Dengan demikian kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun dalam Ruang Lingkup Transaksi Biaya dalam katagori berkinerja “bersih dari korupsi”.

Hasil jawaban kuesioner Indeks Persepsi Anti Korupsi pengguna layanan di Pengadilan Negeri Sarolangun, Ruang lingkup Transaksi Biaya di sajikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 11. Indeks Pada Indikator Transaksi Biaya**

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	%	NRR
1.	Tidak mudah	1	0	0	0,00
2.	Kurang mudah	2	0	0	0,00
3.	Mudah	3	1	3	0,100
4.	Selalu mudah	4	29	97	3,867
<b>Jumlah</b>			<b>30</b>	<b>100</b>	<b>3,967</b>

\*NRR : Nilai Rata-Rata diperoleh dari jumlah nilai perunsur dibagi dengan jumlah responden.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut :



**Gambar 8.**  
**Grafik Indeks Pada Indikator Transaksi Biaya**

### 3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Ruang Penyalahgunaan Jabatan ini diperoleh rata-rata skor 3,967 (Tiga koma Sembilan Enam Tujuh) berada pada interval 3,26 s/d 4,00, dengan kategori kinerja “bersih dari korupsi”. Dengan demikian kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun dalam Ruang Lingkup Biaya Tambahan dalam katagori berkinerja “bersih dari korupsi”.

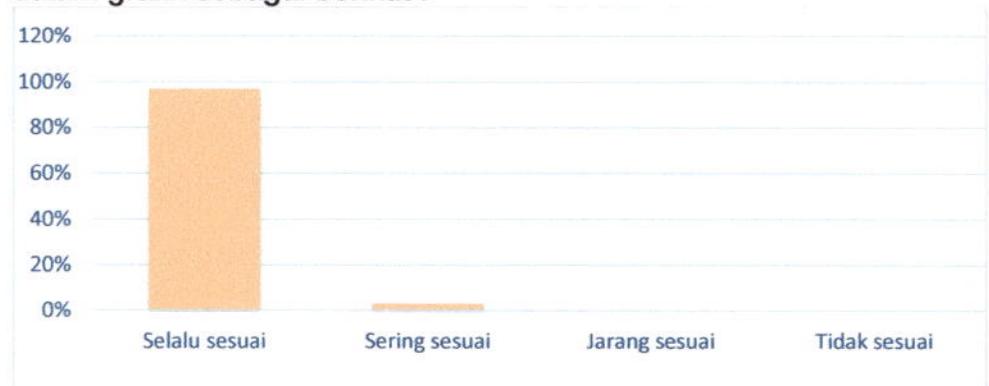
Hasil jawaban kuesioner Indeks Persepsi Anti Korupsi pengguna layanan di Pengadilan Negeri Sarolangun, Ruang lingkup Biaya Tambahan di sajikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 12.Indeks Pada Indikator Biaya Tambahan**

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	%	NRR
1.	Tidak sesuai	1	0	0	0,00
2.	Jarang sesuai	2	0	0	0,00
3.	Sering sesuai	3	1	3	0,100
4.	Selalu sesuai	4	29	97	3,867
<b>Jumlah</b>			<b>30</b>	<b>100</b>	<b>3,967</b>

\*NRR : Nilai Rata-Rata diperoleh dari jumlah nilai perunsur dibagi dengan jumlah responden.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut :



**Gambar 9.**  
**Grafik Indeks Pada Indikator Biaya Tambahan**

### 3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Ruang Lingkup Hadiah ini diperoleh rata-rata skor 4,00 (Empat koma Nol) berada pada interval 3,26 s/d 4,00, dengan kategori kinerja “bersih

dari korupsi". Dengan demikian kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun dalam Ruang Lingkup Hadiah dalam katagori berkinerja "bersih dari korupsi".

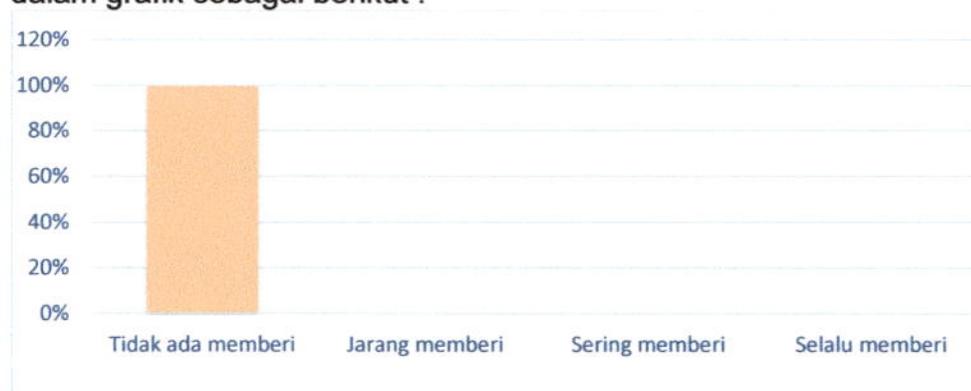
Hasil jawaban kuesioner Indeks Persepsi Anti Korupsi pengguna layanan di Pengadilan Negeri Sarolangun, Ruang lingkup Hadiah di sajikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 13.Indeks Pada Indikator Hadiah**

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	%	NRR
1.	Selalu memberi	1	0	0	0,00
2.	Sering memberi	2	0	0	0,00
3.	Jarang memberi	3	0	0	0,00
4.	Tidak ada memberi	4	30	100	4,00
<b>Jumlah</b>			<b>30</b>	<b>100</b>	<b>4,00</b>

\*NRR : Nilai Rata-Rata diperoleh dari jumlah nilai perunsur dibagi dengan jumlah responden.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut :



**Gambar 10.**

**Grafik Indeks Pada Indikator Hadiah**

### 3.2.7. Indikator Transparansi Biaya.

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Ruang Lingkup Transparansi Biaya ini diperoleh rata-rata skor 3,967 (Tiga koma Sembilan Enam Tujuh) berada pada interval 3,26 s/d 4,00, dengan kategori kinerja "bersih dari korupsi". Dengan demikian kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun dalam Ruang Lingkup Transparansi Biaya dalam katagori berkinerja "bersih dari korupsi".

Hasil jawaban kuesioner Indeks Persepsi Anti Korupsi pengguna layanan di Pengadilan Negeri Sarolangun, Ruang lingkup Transparansi Biaya di sajikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 14.Indeks Pada Indikator Transparansi Biaya**

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	%	NRR
1.	Tidak menerima	1	0	0	0,00
2.	Jarang menerima	2	0	0	0,00
3.	Sering menerima	3	1	3	0,100
4.	Selalu menerima	4	29	97	3,867
<b>Jumlah</b>			<b>30</b>	<b>100</b>	<b>3,967</b>

\*NRR : Nilai Rata-Rata diperoleh dari jumlah nilai perunsur dibagi dengan jumlah responden.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut :



**Gambar 11.**  
**Grafik Indeks Pada Indikator Transparansi Biaya**

### 3.2.8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Ruang Lingkup Percaloan ini diperoleh rata-rata skor 4,00 (Empat koma Nol) berada pada interval 3,97 s/d 4,00, dengan kategori kinerja “bersih dari korupsi”. Dengan demikian kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun dalam Ruang Lingkup Percaloan dalam katagori berkinerja “bersih dari korupsi”.

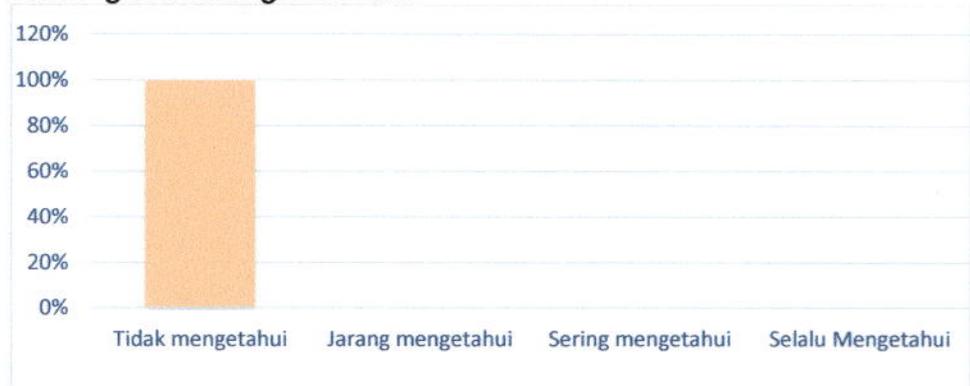
Hasil jawaban kuesioner Indeks Persepsi Korupsi pengguna layanan di Pengadilan Negeri Sarolangun, Ruang lingkup Percaloan di sajikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 15.Indeks Pada Indikator Percaloan**

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	%	NRR
1.	Selalu Mengetahui	1	0	0	0,00
2.	Sering mengetahui	2	0	0	0,00
3.	Jarang mengetahui	3	0	0	0,00
4.	Tidak mengetahui	4	30	100	4,00
<b>Jumlah</b>			<b>30</b>	<b>100</b>	<b>4,00</b>

\*NRR : Nilai Rata-Rata diperoleh dari jumlah nilai perunsur dibagi dengan jumlah responden.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut :



**Gambar 12.**  
**Grafik Indeks Pada Indikator Percaloan**

### 3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Ruang Lingkup Perbuatan Curang ini diperoleh rata-rata skor 4,00 (Empat koma Nol) berada pada interval 3,26 s/d 4,00, dengan kategori

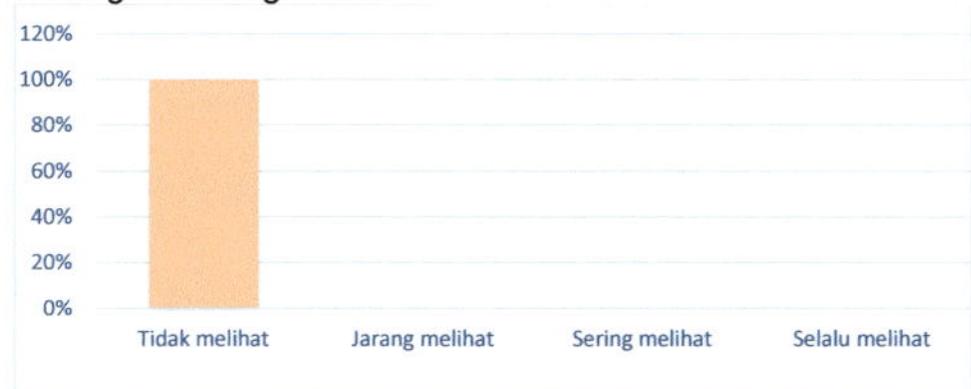
kinerja “bersih dari korupsi”. Dengan demikian kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun dalam Ruang Lingkup Perbuatan Curang dalam katagori berkinerja “bersih dari korupsi”. Hasil jawaban kuesioner Indeks Persepsi Korupsi pengguna layanan di Pengadilan Negeri Sarolangun, Ruang lingkup Perbuatan Curang di sajikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 16. Indeks Pada Indikator Perbuatan Curang**

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	%	NRR
1.	Selalu melihat	1	0	0	0,00
2.	Sering melihat	2	0	0	0,00
3.	Jarang melihat	3	0	0	0,00
4.	Tidak melihat	4	30	100	4,00
<b>Jumlah</b>			<b>30</b>	<b>100</b>	<b>4,00</b>

\*NRR : Nilai Rata-Rata diperoleh dari jumlah nilai perunsur dibagi dengan jumlah responden.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut :



**Gambar 13.**

**Grafik Indeks Pada Indikator Perbuatan Curang**

### 3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia.

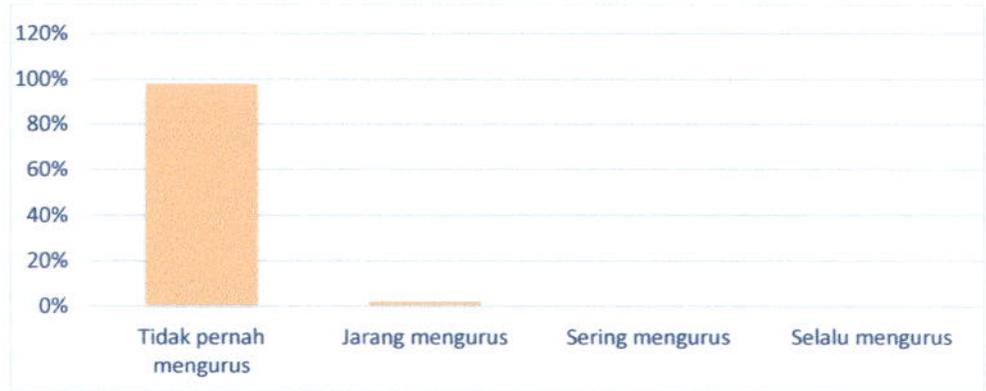
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Ruang Lingkup Transaksi Rahasia ini diperoleh rata-rata skor 4,00 (Empat koma Nol berada pada interval 3,26 s/d 4,00, dengan kategori kinerja “bersih dari korupsi”. Dengan demikian kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun dalam Ruang Lingkup Transaksi Rahasia dalam katagori berkinerja “bersih dari korupsi”. Hasil jawaban kuesioner Indeks Persepsi Korupsi pengguna layanan di Pengadilan Negeri Sarolangun, Ruang lingkup Transaksi Rahasia di sajikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 17. Indeks Pada Transaksi Rahasia**

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	%	NRR
1.	Selalu mengurus	1	0	0	0,00
2.	Sering mengurus	2	0	0	0,00
3.	Jarang mengurus	3	0	0	0,00
4.	Tidak pernah mengurus	4	30	100	4,00
<b>Jumlah</b>			<b>30</b>	<b>100</b>	<b>4,00</b>

\*NRR : Nilai Rata-Rata diperoleh dari jumlah nilai perunsur dibagi dengan jumlah responden.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut :



**Gambar 14.**  
**Grafik Indeks Pada Transaksi Rahasia**

### 3.3. INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI SATUAN KERJA PADA PENGADILAN

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sarolangun sebesar 3,98.

**Tabel 18.**  
**Indeks Persepsi Korupsi**  
**Satuan Kerjapada Pengadilan Negeri Sarolangun**

No.	Ruang Lingkup	NRR	NRRT	IPK
1.	Manipulasi Peraturan	3.933	0.393	9.82
2.	Penyalahgunaan Jabatan	4.00	0.400	10
3.	Menjual Pengaruh	4.00	0.400	10
4.	Transaksi Biaya	3.967	0.397	9.92
5.	Biaya Tambahan	3.967	0.397	10
6.	Hadiah	4.00	0.400	10
7.	Transparansi Pembayaran	3.967	0.397	9.92
8.	Percaloan	4.00	0.400	9.92
9.	Perbuatan Curang	4.00	0.400	10
10.	Transaksi Rahasia	4.00	0.400	10
<b>NILAI</b>			<b>3.98</b>	<b>99.58</b>

Indeks **3,98** tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka **99,58**;

**Tabel 19.**  
**Persepsi Korupsi Satuan Kerja**  
**pada Pengadilan Negeri Sarolangun**

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00-1.75	25-43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76-2.50	43.76-62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51-3.25	62.51-81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26-4.00	81.26-100.00	4	Bersih dari korupsi

### 3.4. PERSEPSI RESPONDEN TERHADAP KUALITAS PELAYANAN SATUAN KERJA PADA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN.

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

**Tabel 20.**

#### **Isian masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun**

No	Masukan dan pandangan pengguna layanan satuan kerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan terutama jadwal sidang lebih tepat waktu dan tidak membeda-bedakan.
2	Transparan dan terbuka terhadap masyarakat.
3	Peningkatan fasilitas Umum seperti Ruang Tunggu Pengunjung, Ruang Tunggu Jaksa, Ruang Tunggu Advokat, Toilet, dan Kantin.
4	Peningkatan fasilitas bagi warga Disabilitas seperti Ruang Tunggu prioritas, jalur disabilitas, kursi roda dan alat bantu dengar.

### 4.1. KESIMPULAN.

Dari hasil Survei Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sarolangun diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Sarolangun memiliki Indeks Persepsi Korupsi **3,98** atau masuk pada kategori **BERSIH DARI KORUPSI** ;

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

No.	Ruang Lingkup	NRR	NRRT	IPK
1.	Manipulasi Peraturan	3.933	0.393	9.82
2.	Penyalahgunaan Jabatan	4.00	0.400	10
3.	Menjual Pengaruh	4.00	0.400	10
4.	Transaksi Biaya	3.967	0.397	9.92
5.	Biaya Tambahan	3.967	0.397	10
6.	Hadiah	4.00	0.400	10
7.	Transparansi Pembayaran	3.967	0.397	9.92
8.	Percaloan	4.00	0.400	9.92
9.	Perbuatan Curang	4.00	0.400	10
10.	Transaksi Rahasia	4.00	0.400	10
		<b>NILAI</b>	<b>3,98</b>	<b>99,58</b>

### 4.2. REKOMENDASI.

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2025 tersebut di atas, menunjukkan bahwa 3 (tiga) indikator yang memiliki nilai tertinggi yakni Penyalahgunaan Jabatan, Menjual Pengaruh dan Hadiah. Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa 3 (tiga) indikator terendah yakni Manipulasi Peraturan, Transaksi Biaya dan Biaya Tambahan memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya yang perlu ditingkatkan agar dalam survei yang akan datang memiliki indeks yang tinggi.



**PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II**  
Komplek Perkantoran Gunung Kembang Kab. Sarolangun  
Telp/ Fax : 0745 – 91006  
Website : [www.pn-sarolangun.go.id](http://www.pn-sarolangun.go.id)

**MONITORING DAN EVALUASI HASIL SURVEI  
PERSEPSI ANTI KORUPSI  
JANUARI – MARET 2025**

**I. MONITORING**

Dari hasil survei persepsi korupsi yang dilakukan terhadap responden pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Sarolangun, didapat nilai rata-rata per Indikator (ruang lingkup) sebagai berikut :

No.	Ruang Lingkup	NRR	NRRT	IPK
1.	Manipulasi Peraturan	3.933	0.393	9.82
2.	Penyalahgunaan Jabatan	4.00	0.400	10
3.	Menjual Pengaruh	4.00	0.400	10
4.	Transaksi Biaya	3.967	0.397	9.92
5.	Biaya Tambahan	3.967	0.397	10
6.	Hadiah	4.00	0.400	10
7.	Transparansi Pembayaran	3.967	0.397	9.92
8.	Percaloan	4.00	0.400	9.92
9.	Perbuatan Curang	4.00	0.400	10
10.	Transaksi Rahasia	4.00	0.400	10
		<b>NILAI</b>	<b>3,98</b>	<b>99,58</b>

**II. EVALUASI**

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sarolangun diperoleh nilai Indeks Persepsi Korupsi **3,98** atau masuk pada kategori **Bersih dari Korupsi** ;

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sarolangun Januari s.d Maret tersebut di atas, menunjukkan bahwa tiga indikator memiliki nilai indeks paling tinggi sebagai berikut :

1. Penyalahgunaan Jabatan, dengan nilai indeks rata-rata 4,00 ;
2. Menjual Pengaruh, dengan nilai indeks rata-rata 4,00 ;
3. Hadiah, dengan nilai indeks rata-rata 4,00 ;

Selain tiga indikator yang memiliki nilai indeks tertinggi, dalam survei ini juga terdapat tiga indikator yang memiliki nilai terendah dari sepuluh indikator lainnya, yakni :

1. Manipulasi Peraturan, dengan nilai indeks rata-rata 3,93 ;
2. Transaksi Biaya, dengan nilai indeks rata-rata 3,967 ;
3. Biaya Tambahan, dengan nilai indkes rata-rata 3,967 ;

Yang perlu ditingkatkan agar dalam survei yang akan datang memiliki nilai indeks yang tinggi.

### III. TINDAK LANJUT

Dari hasil Survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan pada Triwulan I 2025, didapat 3 (tiga) indikator atau ruang lingkup yang memiliki nilai rata-rata terendah yakni Manipulasi Peraturan, Transaksi Biaya dan Biaya Tambahan.

Tindak lanjut dari ketiga Indikator (ruang lingkup) tersebut yang memiliki nilai rata-rata terendah tersebut telah dilakukan kegiatan peningkatan, pembenahan dan pelatihan sebagai berikut :

#### 1. Manipulasi Peraturan

Manipulasi Peraturan adalah upaya aparat penegak hukum dalam memberikan informasi yang tidak benar mengenai suatu kebijakan yang berlaku untuk masyarakat. Masyarakat tidak dibekali dengan informasi yang tepat dan tidak transparan sehingga tidak memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan pelayanan. Dalam hal ini, Pengadilan Negeri Sarolangun telah mensosialisasikan seluruh layanan pengadilan melalui website untuk menghindari terjadinya misinformasi kepada para pencari keadilan. Pada website tersebut, masyarakat dapat memperoleh informasi yang komprehensif mengenai kebutuhan yang ingin mereka dapatkan.



Gambar Homepage Website PN Sarolangun

2. Transaksi Biaya adalah Biaya yang dikeluarkan oleh pengguna layanan untuk mendapatkan pelayanan. Untuk mengurangi kecurangan terhadap transaksi biaya ini adapun tindak lanjutnya adalah membuat banner tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada Pengadilan Negeri Sarolangun agar pengguna layanan tau pasti berapa biaya yang akan dikeluarkan.

No.	Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Tarif (Rp/Unit)	Satuan
1.	Pengambilan dan Pendaftaran Surat di Bujur Tunggai	Rp. 10.000,-	Per surat
2.	Penerimaan Tunjangan/Nilai Paksi/Penyertaan Pengadilan	Rp. 500,-	Per lembar
3.	Pencatatan/Revisi/Amat dan Berita Acara Penyertaan di luar Paksi Pengadilan	Rp. 10.000,-	Per Berita Acara
4.	Penyertaan dan Penyertaan Kembali Uang Surat Berharga dan Barang yang diamanatkan di Pengadilan	Rp. 10.000,-	Per surat
5.	Biaya Surat Keterangan Asli yang dibuat di Pengadilan di Luar Paksi	Rp. 10.000,-	Per Akta/ Surat
6.	Pendaftaran Surat Keterangan/Keputusan/Perintah/Keputusan yang diterbitkan di Pengadilan	Rp. 10.000,-	Per surat/Keputusan/Perintah/Keputusan
7.	Pendaftaran/ Surat Keterangan/Keputusan/Perintah/Keputusan dan Surat/Keputusan/Keputusan	Rp. 10.000,-	Per putusan/Keputusan

Gambar Banner Tarif PNBP

### 3. Biaya Tambahan

Biaya Tambahan di lingkungan pengadilan yang dilaksanakan diluar dari kebijakan yang berlaku. Artinya, masyarakat dibebani dengan biaya tambahan yang tidak seharusnya atau diluar kewajaran yang bertujuan untuk kepentingan pribadi aparat penegak hukum. Dalam hal ini, Pengadilan Negeri Sarolangun menerapkan pembayaran satu pintu terhadap seluruh layanan peradilan melalui Kasir yang terletak di Meja PTSP Kepaniteraan Perdata. Melalui Kasir, seluruh pembayaran akan langsung diarahkan melalui rekening resmi Pengadilan Negeri Sarolangun. Hal ini untuk mencegah terjadinya indikasi pungutan liar di Pengadilan Negeri Sarolangun. Untuk mengurangi kecurangan terhadap adanya biaya tambahan ini adapun tindak lanjutnya adalah membuat banner tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada Pengadilan Negeri Sarolangun agar pengguna layanan tau pasti berapa biaya yang akan dikeluarkan.

**TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**  
**PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN**  
 Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI  
 Nomor : 57/KMA/SK/III/2019  
 Tanggal 28 Maret 2019

No.	Jenis Pelayanan Negara Bukan Pajak	Tarif (Rp/Unit)	Satuan
1.	Pengambilan dan Pendaftaran Surat di Rumah Tangga	Rp. 20.000,-	Per surat
2.	Pengambilan Turun-turun Salinan Akta/akta) Persewaan Pengadilan	Rp. 100,-	Per lembar
3.	Chancun dan Pengambilan Akta dan Berita Acara Penyempulatan di luar Pengadilan	Rp. 10.000,-	Per Berita Acara
4.	Penyempulatan dan Pengambilan Kembali Akta, Surat dan/atau Dokumen yang ditandatangani di Pengadilan	Rp. 10.000,-	Per surat
5.	Melakukan Kewenangan di luar Pengadilan	Rp. 10.000,-	Per akta/akta
6.	Pengambilan Surat Keseluruhan Salinan (brosur) untuk keperluan akta yang diterbitkan di Pengadilan	Rp. 10.000,-	Per surat Salinan (brosur)
7.	Pengambilan Akta yang telah dibuat oleh pada Pengadilan	Rp. 10.000,-	Per permohonan penutupan

Gambar Banner Tarif PNBPN

Mengetahui,

Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun



*Novarina Manurung*

Novarina Manurung, S.H  
 NIP. 19761109 200112 2002

Sarolangun, 10 April 2025

Panitera Muda Hukum

*Dedek Marinta Br. Barus*

Dedek Marinta Br. Barus, S.H  
 NIP. 19880412 201212 2 001